

# NILAI EKONOMI PENDIDIKAN: INTERPRETASI NILAI PENDIDIKAN DI INDONESIA

**Miftahul Ulya**

*Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*

**Sarmo**

*Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*

*e-mail: bangsarmo212@gmail.com*



## **Abstrak**

Nilai modal manusia (*human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar, tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*brain intensif*). Pendidikan dan pelatihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja suatu bangsa. Kesejahteraan dan keunggulan suatu bangsa amat bergantung pada kompetensi intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual bangsanya. Untuk mewujudkan bangsa yang makmur, sejahtera dan mampu bersaing dengan bangsa lain, maka pendidikan yang bermutu menjadi salah satu faktor utama suatu bangsa. Investastasi sumber daya manusia dalam dunia pendidikan harus menjadi komitmen dan prioritas pemerintah yang harus direalisasikan melalui APBN dan APBD sesuai dengan mandat dan amanat Undang-Undang. Disamping itu, kesadaran masyarakat berinvestasi untuk pendidikan perlu diwujudkan dalam bentuk keterlibatan secara aktif dalam dunia pendidikan. Adanya komitmen dari pemerintah yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang akan melahirkan bangsa yang cerdas, maju, sejahtera dan berperadaban tinggi.

**Kata kunci:** *nilai, ekonomi, pendidikan, kecerdasan, pemerintah.*

## A. PENDAHULUAN

Problematika negara berkembang seperti Indonesia utamanya terletak pada nilai ekonomi dan nilai pendidikan. Sebuah negara akan kuat jika nilai ekonomi dan nilai pendidikan juga kuat, begitu pula sebaliknya. Lebih lanjut, melalui Undang-undang Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003, memberikan mandat dan amanat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Meskipun Pemerintah telah menjamin nilai pendidikan di Indonesia, akan tetapi nilai pendidikan di negeri ini tergolong “agak” mahal. Buktinya setiap awal tahun banyak warga “kurang” mampu berbondong-bondong ke kantor Desa atau Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), meski disisi lain banyak yang berani membayar lebih untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik seperti menyekolahkan anak-anak ke Sekolah favorit atau *bonafide* dengan biaya yang relatif mahal. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa pendidikan bukanlah kegiatan atau pelayanan yang murah meskipun negara telah menjaminkannya.

Disisi lain, masyarakat tradisional menilai bahwa pendidikan adalah pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat (*up to down*) atau sering disebut *public service*. Pola pikir masyarakat yang demikian mengakibatkan makna dan nilai pendidikan kurang menarik dan terkesan monoton.

Berbeda dengan masyarakat modernis, yang menganggap bahwa makna dan nilai pendidikan adalah nilai investasi bangsa dan negara di masa depan. Sehingga mengalokasikan anggaran pendidikan adalah wajib, namun disisi lain ranking pendidikan Indonesia masihlah rendah jika dibandingkan Malaysia apalagi Singapura. Sehingga akhir-akhir ini muncullah anggapan penganggaran 20% dari APBN untuk pendidikan hanyalah memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya terutama dari kacamata ekonomi dan kapitalis. Cara pandang tersebut akan tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang belakang di atas, maka fokus kajian dari artikel ini membahas nilai ekonomi pendidikan; sebuah interpretasi nilai pendidikan di Indonesia yang setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun belum dapat dibarengi dengan ranking pendidikan di Indonesia.

## **B. DEFINISI EKONOMI PENDIDIKAN**

Ekonomi pendidikan didefinisikan sebagai suatu studi tentang bagaimana manusia baik secara kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam mendayagunakan sumberdaya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat sikap dan nilai-nilai, khususnya melalui pendidikan formal serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (*equal*) dan adil (*equality*) diantara berbagai kelompok masyarakat.<sup>1</sup>

Ekonomi pendidikan merupakan aktivitas pemenuhan tuntutan permintaan kebutuhan manusia terdidik melalui belajar yang harus dibiayai. Penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat atau perorangan. Pendidikan harus memberikan hasil yang terbaik, tetapi biaya yang dikeluarkannya harus seefisien mungkin. Namun, produktivitas sumber daya manusia lulusan yang dihasilkan harus member nilai tambah pada pola perbaikan hidup dirinya, keluarga, masyarakat maupun kesejahteraan bangsanya<sup>2</sup>.

Pendidikan memproses manusia hingga menjadi manusia produktif yang memiliki kemampuan membangun, pembangunan itu sendiri dilakukan oleh manusia yang dibangun oleh pendidikan. Modal yang ditanam untuk pendidikan berperan sebagaimana modal yang ditanam untuk memproduksi barang dalam industri yang menguntungkan. Bedanya produk yang diharapkan menjadi *output* pendidikan bukan berupa komoditi, tetapi berupa manusia yang terampil yang berkemampuan membangun. Karena itulah, konsep investasi pendidikan disebut "*investment in human capital*" atau investasi sumberdaya manusia.

Teori manusia sebagai modal atau teori *human capital* lebih populer setelah Theodore Schultz, memperoleh nobel ekonomi di tahun 1979, ia mengemukakan bahwa pendidikanlah yang mengangkat derajat manusia, yang mengangkat manusia kepada derajat perubahan hidup yang lebih baik. Pendidikan berfungsi dinamis, yang memungkinkan manusia melakukan akulturasi budaya sehingga bisa selektif menerima budaya baru yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 18.

<sup>2</sup> Suhardan, Dadang, Riduan & Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 5.

Usaha mengangkat masyarakat miskin menjadi sejahtera menurut teori *human capital* tidak tergantung pada uang, lahan, teknologi ataupun kelengkapan industri, melainkan kepada pengetahuan yang dimilikinya sebagai modal utama. Manusia menjadi aset utama dalam kegiatan ekonomi. Kecerdasan dan keterampilan hasil pendidikan inilah yang kemudian disumbangkan menjadi karya nyata yang memajukan perekonomian. Teori ini berkonsentrasi pada manusia sebagai faktor produksi yang dominan dalam mengaktifkan peralatan, barang, sumber daya maupun teknologi, sebab semuanya pasif bila tidak digerakkan manusia.

Ketersediaan dana pendidikan sejak zaman dahulu sampai sekarang masih menjadi masalah, baik biaya rutin maupun dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Di Negara berkembang termasuk Indonesia, sumber dana untuk membiayai pendidikan berasal dari APBN dan APBD, besarnya tergantung pada kemampuan Negara dan komitmennya terhadap pendidikan. Tuntutan masyarakat sekarang bukan hanya sekedar terpenuhinya kewajiban belajar, melainkan dituntut pendidikan yang murah dan berkualitas, oleh karena itulah pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan dana pendidikan yang besar, sebab pendidikan merupakan usaha raksasa dalam mencerdaskan bangsa.

Akan tetapi masyarakat menilai bahwa biaya pendidikan sudah menggilai, karena biaya pendidikan yang dia lihat jauh diatas kemampuan membayar dan pendapat yang riil yang dia terima tiap bulan<sup>3</sup>. Sebagian masyarakat Indonesia masih membayangkan penyelenggaraan pendidikan tradisional dimana biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan ditanggung oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, misalnya padepokan, pondok pesantren tradisional. Masyarakat yang menyertakan pendidikan anak-anaknya tidak perlu membayar uang sedikitpun. Hal serupa diambil oleh pemerintahan orde baru, dimana anak sekolah tidak perlu lagi membayar biaya pendidikan.

### **C. PENDEKATAN EKONOMI PENDIDIKAN: PENDEKATAN MIKRO**

Peran ekonomi secara mikro dapat dibuktikan bahwa orang memandang kehidupan seseorang dapat meningkat atau menurun karena terkait erat

---

<sup>3</sup> Harsono. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 31.

dengan perekonomian. Jarang orang mengaitkan naik turunnya taraf kehidupan seseorang itu dengan tingkat kedamaian hati, kebahagiaan keluarga, kejujuran dan kesucian hidup seseorang<sup>4</sup>. Pada umumnya tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah pendidikan anaknya. Secara sadar atau tidak orang tua dalam merencanakan pendidikan bagi anak-anaknya menggunakan pendekatan nilai imbalan. Pendekatan ini digunakan untuk mencari keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Prinsip untung rugi dipakai oleh mereka yang rasional dalam memutuskan bagaimana sebaiknya membelanjakan uangnya agar keinginannya tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ekonomi itu memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang, walaupun orang tersebut menyadari bahwa kehidupan gemerlap tidak menjamin kebahagiaan, yang penting bagi mereka bagaimana dapat meraih tingkat perekonomian yang lebih tinggi. Banyak sekali keluarga miskin yang dalam perekonomian mereka hanya dapat untuk makan saja, dan tidak dapat membiayai sekolah bagi anak-anaknya, kata miskin di atas diukur dari tingkat perekonomian bukan tingkat rohani dan kualitas mental.

Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah murid pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun bersangkutan. Perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f [K(s,t) \text{ dan } M(s,t)]$$

Keterangan:

$S_b$  : satuan biaya per murid per tahun

$K$  : jumlah seluruh pengeluaran

<sup>4</sup> Satmoko & Sriningsih, Retno, *Landasan Kependidikan: Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Pancasila*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999), hlm. 109.

- M : jumlah murid  
 S : sekolah tertentu  
 T : tahun tertentu

#### D. PENDEKATAN EKONOMI PENDIDIKAN: PENDEKATAN MAKRO

Analisis kegiatan pendidikan dilakukan oleh berbagai ilmuwan antara lain ilmuwan ekonomi. Menurut Dimiyati yang telah dikutip oleh Satmoko, menyatakan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara kegiatan pendidikan dengan kegiatan ekonomi yang diharapkan menjadi tenaga kerja. Terdapat dua pandangan yang satu sisi menyatakan kegiatan pendidikan merupakan pemborosan dana masyarakat, dipihak lain menyatakan kegiatan pendidikan merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi produktif untuk masyarakat<sup>5</sup>.

Analisis ilmu ekonomi menunjukkan bahwa objek ilmu ekonomi adalah tindak ekonomis. Tindak ekonomis adalah memilih secara bijaksana sehubungan dengan keadaan alam, modal, tenaga kerja, organisasi dan waktu yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Analisis unsur-unsur tentang tindak ekonomi bermanfaat untuk memahami hubungan antara sistem ekonomis dan sistem pendidikan. Perbedaannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Perbandingan Antara Tindak Ekonomis Dan Tindak Pendidikan

| KOMPONEN           | TINDAK EKONOMIS   | TINDAK PENDIDIKAN   |
|--------------------|---|---|
| a. Tujuan Tindakan | Memperoleh keuntungan material atau saling menguntungkan                  | Menumbuhkan kebangkitan individu sebagai pribadi yg <i>self help</i> .  |
| b. Pelaku Tindakan | Orang dewasa yang menanggung biaya hidup (sesuai aturan dalam masyarakat) | Orang dewasa dan anak atau orang dewasa dan orang yg belum dewasa yg berfungsi sebagai pendi dik atau anak didik. |

<sup>5</sup> Satmoko & Sriningsih, Retno, Landasan Kependidikan: Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Pancasila, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999), hlm. 106.

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| c. Dasar Tindakan | Kaidah ekonomi non susila (non etis)   | Kesulitan sesuai martabat manusia   |
| d. Orientasi      | Untung rugi ekonomis dan efisiensi   | Terbentuknya keutuhan martabat manusia sebagai pribadi                      |
| e. Waktu Kegiatan | Terbatas, dalam rangka perhitungan keuntungan ekonomis                       | Sepanjang hayat dengan perhitungan usia produktif                           |
| f. Nilai-Nilai    | Nilai ekonomis dalam sistem ekonomi yg berlaku, umumnya dihitung dengan uang | Nilai paedagogis dalam kaitan nilai sosial budaya                           |
| g. Hasil Tindakan | Barang berupa jasa, atau uang  | Berupa orang terpelajar, tenaga terampil yg diharapkan menjadi tenaga kerja |
| h. Harga Satuan   | Jumlah penghasilan dibagi jumlah penduduk setiap tahun                       | Jumlah biaya pendidikan dibagi lulusan setiap tahun.                        |

Perkembangan perekonomian makro berpengaruh sekali dalam bidang pendidikan, seperti sekarang ini banyak sekali orang kaya yang mau menjadi bapak angkat bagi anak-anak yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih baik. Perkembangan lain yang sangat mengembirakan adalah terlaksananya sistem ganda dalam dunia pendidikan, hal ini berlangsung baik di lembaga pendidikan yaitu kerjasama sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar.

Sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misi masing-masing sekolah<sup>6</sup>. Dengan demikian, sekolah secara mandiri, tetapi masih dalam rangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap

<sup>6</sup> Kurniady, *Pembiayaan Pendidikan: Ekonomi, Pendidikan dan Ekonomi Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 21.

pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan sekolah.

Kemajuan pembangunan perekonomian secara makro dapat juga berdampak timbulnya sekolah-sekolah unggul yang memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap karena dibiayai dan dipunyai oleh kebanyakan orang-orang kaya. Walaupun kebijakan dan program sekolah ini tidak sama dengan yang lain, diharapkan agar tidak terdapat pilih-kasih dalam menerima para siswa artinya calon siswa dari manapun asalnya hendaklah dapat diberikan kesempatan dalam menempuh pendidikan di sekolah unggulan tersebut dan yang paling penting juga adalah dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta tidak menyimpang dengan tujuan nasional negara kita.

Jadi inti tujuan pendidikan adalah membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja dan hasil kerja yang baik. Tidak menolak pekerjaan kasar, menyadari akan kehidupan yang kurang beruntung dan mampu hidup dalam keadaan apapun.

Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara<sup>7</sup>. Pada alokasi biaya pendidikan terutama yang bersumber dari pemerintah meningkatkan pengaruh berdasarkan struktur piramida karakteristik. Pola ini memberikan tinjauan kasar tentang prioritas biaya yang bersumber dari pemerintah. Pada umumnya, negara-negara di Asia mengalokasikan dana pemerintah untuk pendidikan dasar sebesar 48%, pendidikan menengah 31%, dan pendidikan tinggi sebesar 19%. Pola yang menurun ini sama dengan pola Amerika Serikat yang berkontribusi dana pemerintah masing-masing 51%, 25%, dan 24% (Bank Dunia).

Untuk membandingkan biaya pendidikan pada tiap jenjang tiap negara, teknik yang digunakan yaitu dengan membandingkan biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya. Besarnya biaya satuan berdasarkan perbandingan persentase dan GNP. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, rata-rata satuan biaya pendidikan dasar di negara-negara Asia yang menjadi objek studi adalah 10% dari GNP, sama dengan Amerika Latin, pada pendidikan menengah rata-rata satuan biaya di Asia

---

<sup>7</sup> Nanang Fattah (ed.), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (TIM Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia)*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2009), hlm. 71.



adalah 19% GNP. Sedafigkati di Attierika Latin meticipai 25%, Philipina dan Srilanka memiliki biaya tat-ensfah yaitu *icathing tith* 5 b 5 kali tekithal. Seperti India, Thailand satuari biaya di bawah rata-itta, sedangkati Indonesia, Korea, Malaysia memiliki satuan biaya di atas rata-rata.

Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi. Variasi atau keragaman dalam besarnya satuan biaya disebabkan perbedaan cara menyelenggarakan pendidikan. Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi, antara lain:

a) Skala gaji guru dan jam terbang mengajar; b) Penataran dan latihan pra jabatan; c) Pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas; d) Penggunaan metode dan bahan pengajar; e) Sistem evaluasi, dan f) Supervisi Pendidikan Alasan adanya perbedaan satuan biaya antara negara-negara di Asia bermacam-macam. Misalnya, di Bangladesh tingkat biaya terutama disebabkan rasio guru-siswa yang sangat tinggi, sedangkan di Srilangka disebabkan gaji guru yang relatif rendah.

## **E. PERAN DAN FUNGSI EKONOMI PENDIDIKAN**

Peranan ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan tetapi bukan sebagai pemegang peranan penting sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian dan ketrampilan pengelola guru-gurunya. Inilah yang merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Artinya apabila pengelola dan guru-guru/dosen-dosen memiliki dedikasi yang memadai, ahli dalam bidangnya dan memiliki ketrampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, memberi kemungkinan lembaga pendidikan akan sukses melaksanakan misinya walaupun dengan ekonomi yang tidak memadai.

Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah, disini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakn lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang proses pendidikan

ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada hal-hal:

- a. Untuk membeli keperluan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri seperti prasarana dan sarana, media, alat peraga dan sebagainya.
- b. Membiayai semua perlengkapan gedung, seperti air, listrik telpon.
- c. Membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan.
- d. Mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi, seperti; belajar hidup hemat.
- e. Memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan.
- f. Meningkatkan motivasi kerja.
- g. Meningkatkan gairah kerja para personalia pendidikan.

Dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas, oleh karena itu ada kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak Sumber-sumber dana pendidikan yang mungkin bisa diperoleh di antaranya:

- a. Dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, penelitian dan sebagainya.
- b. Kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta maupun dunia usaha. Kerja samanya dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat.
- c. Memebentuk pajak pendidikan. Program ini bisa dirancang bersama antara lembaga pemerintah setempat dan masyarakat, dengan cara ini bukan saja orang tua siswa yang membayar dana pendidikan tetapi semua masyarakat.
- d. Usaha-usaha lainnya.

Menurut jenisnya pembiayaan pendidikan dibagi atas:

- a. Dana rutin adalah dana yang dipakai untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji pendidikan pengabdian masyarakat, penelitian dan sebagainya.
- b. Dana pembangunan, adalah dana yang dipakai untuk membiayai pembangunan fisik diberbagai bidang, seperti; membangun prasarana dan sarana, alat belajar, media, dan kurikulum baru.

- c. Dana bantuan masyarakat, termasuk SPP yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan.
- d. Dana usaha lembaga sendiri yang penggunaannya untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan.

Didalam mengelola dan merencanakan sumber dana, maka ada tiga macam perencanaan biaya pendidikan yaitu: a). Perencanaan secara tradisional, yaitu merencanakan masing-masing pendidikan maka masing-masing pendidikan tersebut ditentukan biayanya; b). SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program Dan Penganggaran): Pengaturan jenis-jenis kegiatan dalam pendidikan diatur dalam sistem, alokasi dana disusun berdasarkan realita, dan semua kegiatan ditujukan pada pencapaian target pendidikan; c). ZBB (*Zero Base Budgeting*), hanya diatur untuk satu tahun anggaran. Dengan demikian dana pendidikan perlu dikelola secara profesional dengan SP4 dan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pembelian yang sah.

## **F. FUNGSI PRODUKSI DALAM PENDIDIKAN**

Fungsi produksi dalam pendidikan, adalah hubungan antara *output* dan *input*, yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

### a. Fungsi Produksi Administrator

Yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses dalam pendidikan, *input* pendidikan meliputi:

- 1) Prasarana dan sarana belajar, termasuk ruangan kelas dapat diuangkan, artinya bahwa perhitungan luas dan kualitas bangunan.
- 2) Perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga juga dihitung harganya.
- 3) Buku-buku pelajaran, dan bentuk material lainnya seperti film, disket dan sebagainya.
- 4) Barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium dan sebagainya.
- 5) Waktu guru bekerja, dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik harus dibeli dan dibayar.

Kelima jenis input di atas sesudah dinilai dalam bentuk uang kemudian dijumlahkan. Sementara itu yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar.

b. Fungsi Produksi Dalam Psikologi.

Fungsi produksi dalam produksi ini adalah sama dengan *input* fungsi produksi administrator akan tetapi *output* nya berbeda. Hasil *output* yang ada pada fungsi ini adalah hasil belajar siswa yang mencakup; peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, penambahan pengetahuan, ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan estetika (keindahan) serta keterampilan. Suatu lembaga pendidikan dipandang berhasil dari segi fungsi produksi psikologi, kalau harga inputnya sama atau lebih kecil daripada harga outputnya. Indikator harga hanya dapat dicari dalam bentuk manfaatnya lulusan dimasyarakat serta kecocokannya dengan norma dan kondisi masyarakat

c. Fungsi Produksi Ekonomi

Sebagai inputnya adalah semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi produksi administrator, semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan yaitu uang saku, membeli buku dan sebagainya selama masa belajar dan uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah, tetapi tidak didapat sebab waktu tersebut dipakai untuk belajar atau kuliah. Sementara yang menjadi outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja, manakala orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah. Dan apabila ia belum pernah bekerja yang menjadi outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat dan bekerja. Dalam menghitung harga-harga produksi ekonomi ada berbagai kesulitan yang menghadang yaitu:

- 1) Jika peserta didik tamat, belum tentu ia segera bekerja.
- 2) Selama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan, maka ia memutuskan untuk bekerja seadanya dengan penghasilan yang tidak tetap.
- 3) Kalau lulusan tersebut membuat usaha sendiri dengan modal seadanya, penghasilan tiap bulan tidak mungkin tertatur.
- 4) Walaupun lulusan bisa bekerja dengan penghasilan tetap tiap bulan sangat mungkin dia mencari tambahan penghasilan diluar untuk meningkatkan nafkahnya.

- 5) Bila bekerja disektor swasta, pengasilannya sulit dihitung sebab upah atau gaji perusahaan bervariasi.
- 6) Walaupun lulus ini bisa bekerja dengan penghasilan tiap bulan maka dia mencari tambahan diluar untuk meningkatkan nafkahnya.

Dengan demikian fungsi produksi ekonomi akan bisa diaplikasikan dengan baik jika ada jaminan bahwa peserta didik segera bekerja setelah lulus sebagai Pegawai dengan gaji yang cukup sehingga tidak mencari tambahan pekerjaan diluar. Fungsi produksi ekonomi bertalian erat dengan marketing didunia pendidikan. Dalam hal ini Keuntungan marketing adalah:

- 1) Meningkatnya misi pendidikan secara sukses dan terselenggara dengan baik, sebab diisi dengan program yang baik.
- 2) Kepuasan masyarakat ditingkatkan.
- 3) Meningkatkan daya tarik terhadap petugas, peserta didik, dana donatur.
- 4) Meningkatkan keefesiensi dan kegiatan pemasaran.

Akan tetapi dalam marketing juga terdapat kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Ada kecenderungan lembaga pendidikan selalu dijadikan usaha dagang untuk mendapatkan keuntungan, dan 2) Idealisme pendidikan cenderung diabaikan.

Negara-negara maju hubungannya antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi sangatlah jelas, dimana sistem pendidikan diorientasikan kepada kebutuhan ekonomi yang didasari pada teknologi tinggi, fleksibilitas dan mobilitas angkatan kerja (Made Pidarta, 2007: 254). Dalam masa pembangunan dinegara kita sekarang ini pengembangan ekonomi mendapat tempat strategis, dengan munculnya Link and Match, kebijaksanaan ini meminta dunia pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerja, mencakup mutu, dan jumlah serta jenisnya.

## **G. MENGUKUR BIAYA PENDIDIKAN**

Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen terdiri dari lembaga, jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan

bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*, biaya kesempatan ini sering disebut *income forgone*)<sup>8</sup>. *Income Forgone* yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan ke SMU, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika melanjutkan besarnya pendapatan (*upah, gaji*) selama 3 tahun belajar di SMU akan diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan (*opportunity cost*). Dengan demikian, biaya keseluruhan (C) selama di SMU terdiri dari biaya langsung (L) dan biaya tidak langsung (K) atau pendapatan lulusan SMP.

Hal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$C (SMU) = L (SMU) + K (SMU)$$

Keterangan:

C (SMU) : biaya pendidikan

L (SMU) : biaya langsung yang dibayarkan untuk bersekolah

K (SMU) : jumlah rata-rata penghasilan tamatan

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karaktersitik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dan hasil (output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (unit cost) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah di bagi seluruh siswa yang ada di sekolah (enrollmen) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Di dalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima berbagai sumber dana kernudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

---

<sup>8</sup> Nanang Fattah (ed.), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (TIM Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia)*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2009), hlm. 289.

## **H. MENGUKUR MANFAAT PENDIDIKAN**

Perlu dikemukakan bahwa keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang. Hal ini disebabkan manfaat pendidikan, disamping memiliki nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial. Dalam pengukuran dampak pendidikan terhadap keuntungan ekonomi atau pendapat seseorang dari produktivitas yang dimilikinya, memerlukan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi bahwa produktivitas seseorang dianggap merupakan fungsi dari keahlian dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Ukuran hasil pendidikan digabungkan dengan data biaya pendidikan dapat menjadi ukuran efisiensi eksternal. Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu: 1) dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi; 2) dapat tidaknya memperoleh pekerjaan; 3) besar penghasilan (gaji) yang diterima; dan 4) sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politis.

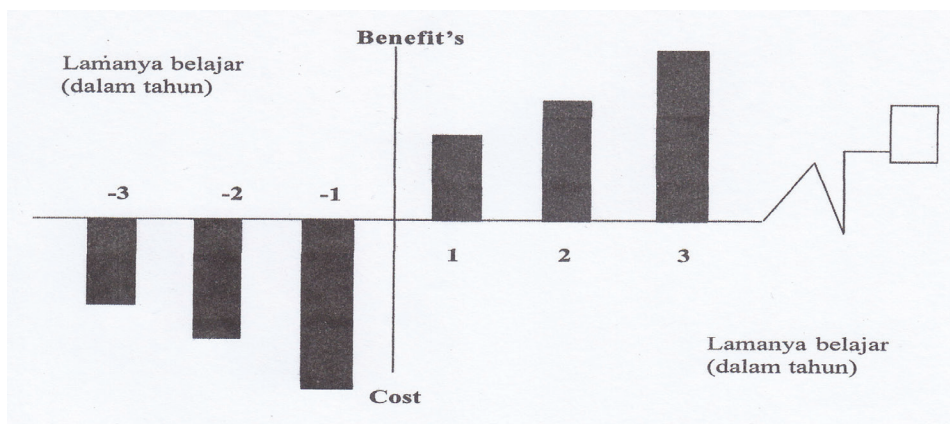
Pada tabel pengukur keuntungan pendidikan, digambarkan bagaimana cara mengukur keuntungan pendidikan dengan biaya (*cost*). Keuntungan tersebut diukur dengan menggunakan pola penghasilan seumur hidup. Pola penghasilan seseorang sepanjang hayatnya akan berbentuk V balik yang dimulai dengan penghasilan yang rendah pada usia muda, meningkat pada masa berikutnya, dan menurun pada usia lanjut. Untuk memperoleh pola penghasilan seumur hidup ini dilakukan dengan dua cara: *cross sectional* dan *longitudinal*.<sup>9</sup> Berikut ini penejelasanannya:

1. *Cross Sectional* dengan jalan mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan kepada sejumlah orang yang bervariasi umumnya, kemudian dicari rata-rata penghasilan dari orang-orang yang usianya sama.
2. *Longitudinal* dengan jalan mengikuti sejumlah orang yang seusia dan penghasilannya diukur pada setiap tingkat usianya.

---

<sup>9</sup> Nanang Fattah (ed.), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (TIM Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia)*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2009), hlm. 293.

Gambar 1: Cara mengukur manfaat pendidikan



Penghasilan atau gaji merupakan ukuran yang paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan pendidikan. Ada tiga alasan yang bisa dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Baik logika maupun pengalaman menunjukkan bahwa mayoritas sosial bersekolah sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
2. Mudah diukur
3. Data gaji cukup tersedia, namun demikian ada beberapa hal yang perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran, yaitu:
  - a) Berapa gaji awal atau gaji seumur hidup dan
  - b) Menggunakan honor atau data konseksional. Profil konseksional mengemukakan gaji orang-orang yang berbeda usia, tetapi tingkat pendidikannya pada waktu tertentu. Dengan menelusuri perkembangan gaji seseorang dalam perkembangan waktu perlu juga diperhatikan, bukan hanya besarnya gaji absolut, tetapi juga seberapa besar pertambahan setelah mendapat pendidikan dan latihan.

## I. NILAI EKONOMI PENDIDIKAN

Menurut Joseph Stiglitz, di Jakarta “Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga”, kata peraih Nobel Ekonomi,



seperti muat pada harian Kompas (15/12/2004)<sup>10</sup>. Pertanyaan ini dilontarkan Stiglitz ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti apa yang diperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini adalah salah satu kesalahan besar kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia.

Peranan pendidikan bahasa teknisnya modal manusia (*human capital*) dalam pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi<sup>11</sup>. Teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan.

Namun, sejumlah misteri masih tersisa. Tingkat pendidikan di negara-negara berkembang sebenarnya mengalami peningkatan drastis pada tahun 1960-1990. Easterly pada tahun 2001 menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari 88 persen menjadi 90 persen, sementara untuk sekolah menengah dari 13 persen menjadi 45 persen. Selanjutnya, jika di tahun 1960 hanya 28 persen negara di dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya mencapai 100 persen, di tahun 1990 menjadi lebih dari separuhnya.

Nyatanya, kenaikan dari tingkat pendidikan di negara-negara berkembang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Ambil contoh Afrika. Antara tahun 1960 hingga tahun 1985 pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun. Nyatanya, ekonomi negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen per tahun. Itu pun karena ada “keajaiban ekonomi” di Afrika, yaitu Botswana dan Lesotho. Kebanyakan negara Afrika lain justru mencatat pertumbuhan negatif dalam periode tersebut. Kasus ekstrem dialami Senegal yang mengalami pertumbuhan angka sekolah hampir 8 persen per tahun, tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Dalam periode yang sama negara-negara Asia Timur mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angka partisipasi sekolah. Namun, perbedaan keduanya tidak banyak, hanya 4,2 persen dibandingkan dengan 2,7 persen. Artinya, jika pendidikan adalah

---

<sup>10</sup> Stiglitz, Joseph. “Economy Growth and Education Policy “Senin-Kamis”, Jakarta”, Kompas, 8 (15) Agustus 2004, hlm. 68.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

rahasia untuk pertumbuhan ekonomi, perbedaan itu seharusnya jauh lebih besar.

Selain tidak bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan juga tidak berhasil menjelaskan fenomena membesarnya kesenjangan dalam pendapatan per kapita. Pritchett pada tahun 2003, menunjukkan terjadinya konvergensi tingkat pendidikan antar negara di dunia. Sepanjang 1960-1995, deviasi standar dalam tingkat pendidikan turun dari 0,94 menjadi 0,56. Tapi, disaat yang sama, deviasi standar untuk pendapatan per kapita antar negara meningkat dari 0,93 menjadi 1,13.

Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat dan produktivitas pekerja juga semakin baik. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Disisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil.

Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin.

Studi dari Foster dan Rosenzweig di tahun 1995 mengenai dampak dari pendidikan terhadap petani di India semasa revolusi hijau bisa memberikan sedikit gambaran. Studi sektor pertanian di negara seperti India (juga Indonesia) sangat relevan dalam wacana pembangunan ekonomi karena mayoritas penduduk, termasuk mereka yang masuk dalam kelompok termiskin, ada di sektor ini.

Dalam studi ini petani yang memiliki pendidikan dasar memang jauh lebih produktif dari pada yang tidak pernah sekolah. Namun, tak ada perbedaan signifikan antara memiliki pendidikan menengah dan hanya pendidikan dasar. Selain itu, di daerah yang kondisi alam dan geografisnya jelek, seringkali produktivitas lebih ditentukan oleh penguasaan, bukan pendidikan. Bagi petani

di tempat-tempat seperti ini, pergi ke sekolah selain tidak banyak bermanfaat, juga membuat mereka kehilangan sekian tahun pengalaman bekerja di sawah.

Orang bisa mendebat baik, dengan pendidikan seseorang bisa mengalami mobilitas sosial. Mereka tak harus terus menjadi petani dan orang miskin jika bisa mengenyam pendidikan. Itulah masalahnya. Dibanyak negara berkembang lain mobilitas sosial tidak selalu dimungkinkan. Di India kasta adalah salah satu hambatan mobilitas sosial, selain banyak hambatan lain. Di negara seperti Indonesia, korupsi yang sudah mengakar hingga ke tingkat penerimaan pegawai bisa jadi alasan lain mengapa mobilitas sosial relatif sulit terjadi.

Lain halnya di Indonesia. Masalah dan tantangan yang dihadapi dibidang pendidikan di Indonesia<sup>12</sup>, antara lain:

1. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah.
2. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan.
3. Kesenjangan tingkat pendidikan.
4. *Good Governance* yang belum berjalan secara optimal.
5. Fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata.
6. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik.
7. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK.
8. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien.
9. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.

Permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akan dialami negara Indonesia dalam jangka panjang kedepan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara. Dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009, peningkatan peran pendidikan ditekankan pada upaya: 1) perluasan dan pemerataan pendidikan, 2) mutu dan relevansi pendidikan dan 3) governance dan akuntabilitas. Ketiga program tersebut

---

<sup>12</sup> Dodi Nandika, *Kebijakan Pembangunan Pendidikan 2005-2009*, (Bandung: UPI, 2005), hlm. 17.

merupakan upaya untuk pembangunan pendidikan secara merata untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketinggalan dibidang peningkatan mutu SDM bisa ditingkatkan sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan diantara negara-negara Asia Pasifik.

## **J. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tentang nilai ekonomi pendidikan di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam dunia pendidikan faktor ekonomi bukan sebagai pemegang peran yang utama, melainkan sebagai pemeran yang cukup menentukan keberhasilan pendidikan sebab dengan ekonomi yang memadai dapat memenuhi semua fasilitas dan aktivitas dunia pendidikan. Faktor yang paling menentukan kehidupan dan kemajuan pendidikan adalah dedikasi, keahlian, keterampilan pengelola dan guru serta dosen dalam setiap lembaga pendidikan.
2. Fungsi ekonomi pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi untuk membentuk manusia ekonomi yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan, seperti: memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah- setengah, produktif, dan bisa hidup efisien/hemat. Tiap lembaga pendidikan diupayakan mampu menghidupi diri sendiri, dengan cara mencari sumber-sumber dana tambahan sebanyak mungkin guna memajukan dunia pendidikan dan dalam penggunaan dana pendidikan haruslah secara professional dan efisien serta efektif selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang produktif, maka sistem pendidikan, struktur kurikulum, serta jenis pendidikan diatur kembali selanjutnya biaya pendidikan ditingkatkan. Dalam nilai ekonomi pendidikan Menurut Joseph Stiglitz, di Jakarta "Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga". Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal

manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat dan produktivitas pekerja juga semakin baik. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

4. SDM yang bermutu sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Para ahli pembangunan percaya, bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu cara utama pengembangan SDM sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang bermutu, setiap lulusan diasumsikan bukan saja memiliki akses untuk mendapat pekerjaan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja besar. Apabila pandangan ini benar, maka implikasinya adalah anggaran belajar pendidikan perlu diingkatkan secara signifikan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang (ed.). 2009. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (TIM Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia)*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Kurniady, Dedy Achmad. 2005. "Pembiayaan Pendidikan: Ekonomi, Pendidikan dan Ekonomi Pendidikan" Dalam <http://file.upi.edu>
- Nandika, Dodi. 2005. *Kebijakan Pembangunan Pendidikan 2005-2009*. Bandung: UPI.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pidarta, Made (ed.). 2009. *Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Satmoko & Sriningsih, Retno. 1999. Landasan Kependidikan (Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Pancasila). Semarang: IKIP Semarang Press.
- Stiglitz, Joseph. "Economy Growth and Education Policy" "Senin-Kamis", Jakarta", Kompas, 8 (15) Agustus 2004: 68
- Suhardan, Dadang, Riduan & Enas. 2012. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.